

## **PERAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DIKELURAHAN MANGALLI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA**

**Jihan Fahira<sup>1\*</sup>, Abdul Mahsyar<sup>2</sup>, Haerana<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study purposed to find out how the role of government officials in empowering youth organizations in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency. This study used descriptive qualitative research. The number of informants in this study amounted to 8 people. The data collection techniques were the instruments of interview, observation and document analysis. The results showed that the role of government officials had not been maximally seen from three indicators, the first was as a motivator, the local government was not carrying out its role because it provided verbal support or without direct meetings with organizational members, which could be a motivation to be more enthusiastic about carrying out activities - activity. secondly, as a communicator, the local government carried out its role quite well because it maintained and provided information related to the agenda or activities to be carried out even though via telephone or short message. Third, as a facilitator, the local government was very lacking in carrying out its role.*

**Keywords:** *the role of government officials, organizational empowerment*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparatur pemerintah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu instrumen wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparatur pemerintah belum maksimal dilihat dari tiga indikator yaitu pertama sebagai motivator, pemerintah setempat kurang menjalankan perannya karena memberi dukungan secara lisan saja atau tanpa melakukan pertemuan langsung dengan para anggota organisasi, yang dimana dapat menjadi suatu motivasi agar lebih bersemangat melaksanakan kegiatan-kegiatan. kedua sebagai komunikator, pemerintah setempat menjalankan perannya dengan cukup baik karena selalu menjaga dan memberikan informasi terkait agenda atau kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun melalui via telepon atau pesan singkat. Ketiga sebagai fasilitator, pemerintah setempat sangat kurang menjalankan perannya dengan baik.

**Kata Kunci:** peran aparatur pemerintah, pemberdayaan organisasi

---

\* jihanfahira@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pembangunan dalam aspek kepemudaan yaitu sebagai hal yang tak dapat terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan kaum muda menjadi sumber daya manusia serta berkualitas dan dapat bersaing dan menjadi salah satu energi agar dapat berhasil di berbagai faktor pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan suatu kepemudaan dianggap merupakan program yang sangat penting dan tidak bisa disepelekan dalam mempersiapkan kehidupan bangsa di masa depan. Akan tetapi harus pula disadari bahwa bidang tertentu kaum muda tidak diperbolehkan berjalan dengan sendirinya, namun membutuhkan eksitasi agar arah langkahnya bisa berjalan sangat baik. Karena, harus diakui pada satu faktor kaum muda mempunyai semangat yang sangat luar biasa dalam melakukan berbagai aktivitas positif untuk kemajuan bangsa.

Menurut Robbins dan Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015 : 182) mengemukakan bahwa peran yaitu sebuah formasi pada sikap yang sangat diharapkan untuk dikaitkan pada seseorang agar memegang kedudukan tertentu pada suatu unit

sosial. Peran pimpinan atau pemerintah dalam sebuah instansi dalam suatu Negara sangat penting maka Negara tersebut akan terarah karena ada yang melayani dan melindungi serta memberikan fasilitas dalam setiap peristiwa yang masyarakat lakukan.

Pemberdayaan organisasi kepemudaan yang dilakukan pemerintah kelurahan Mangalli masih belum maksimal, karena adanya laporan serta keluhan dari berbagai lembaga yang ada di kelurahan Mangalli yaitu kurangnya kepedulian pemerintah kelurahan terhadap organisasi kepemudaan di kelurahan Mangalli baik dalam hal moral maupun moril. Dengan kurangnya perhatian dan kepedulian dari pemerintah membuat kinerja organisasi kepemudaan menjadi tidak kompak dan kurangnya semangat untuk menjalankan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemain sandiwara (film), pandai melawak pada permainan makyong. Perangkat kelakuan yang diharapkan dikuasai oleh seseorang yang berperan penting di masyarakat. Peran menurut Maurice (2010 : 103) mengatakan bahwa istilah “peran” (rule) dipilih secara baik, sebab dia mengatakan bahwa semua orang merupakan pelaku di dalam masyarakat

dimana mereka hidup, juga dia merupakan seorang yang memainkan beberapa peranan layaknya aktor professional.

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Menurut Soekanto, ”peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.”(soekanto, 1987 : 221)

Peran menurut Edy (2018 : 3) sebuah penjelasan yang mengarah pada konotasi ilmu sosial, bahwa peran sebuah fungsi yang dimiliki seseorang saat menduduki sebuah karakterisasi (posisi) dalam bentuk struktur sosial. Peran merupakan salah satu aspek

penting yang dipegang oleh pemimpin dalam proses mencapai tujuan yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Peran menurut Soerjono (2014 : 210-211) mengatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memegang jabatan atau memiliki kekuasaan yang mampu melaksanakan atau merealisasikan suatu hak dan kewajiban yang telah diberikan padanya.

Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai seorang yang memegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator), serta fasilitator dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu (1) Peran pemerintah sebagai regulator yaitu mempersiapkan arah agar dapat menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan (mengadakan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib dalam administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah dapat memberikan acuan dasar yang selanjutnya dilanjutkan oleh masyarakat sebagai instrument agar

dapat mengatur setiap kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan di masyarakat, (2) pemerintah sebagai dinamisor sebagai dinamisor yaitu mengaktifkan partisipasi dari berbagai pihak tatkala kemerosotan terjadi dalam sebuah proses pembangunan (mendorong serta memelihara pergerakan pembangunan daerah). Sebagai dinamisor pemerintah mempunyai peran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif serta efektif pada masyarakat. Bimbingan serta pengarahan ini sangat diperlukan dalam memelihara pergerakan. Pemerintah menggunakan tim penyuluh ataupun badan tertentu agar memberikan bimbingan atau pelatihan kepada masyarakat, (3) peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu mengadakan kondisi yang sangat kondusif untuk penyelenggaraan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak untuk memaksimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berupaya mengadakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman serta aman, termasuk menyediakan sarana serta prasarana pembangunan.

Secara etimologi istilah “Pemerintah” dalam buku Azmi (2016 : 25) berasal dari kata dasar yaitu “perintah” yang berarti memerintah

untuk melakukan sesuatu. Dari kata tersebut dapat dikatakan bahwa “pemerintah” merupakan kekuasaan memerintah sebuah Negara ataupun badan yang tertinggi atau yang dapat memerintah suatu Negara yaitu kepala pemerintahan ataupun cabinet sebuah pemerintahan. Menurut Mariun dalam Asmi (2016 : 26) istilah pemerintah yaitu kata yang mengarah pada suatu badan, organ, atau alat kelengkapan yang melaksanakan fungsi maupun bidang tugas pekerjaan.

Pemerintah menurut Mustopadidjaja dalam Arifin (2015 : 121-122) mengatakan bahwa pemerintah sangat ditentukan oleh tiga hal yakni aparatur pemerintah, organisasi birokrasi, serta prosedur tatalaksananya. Karena itu apabila melakukan suatu kebijakan agar bisa berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya maka dari itu perlu dilakukannya sosialisasi dan pemberdayaan terhadap aparatur pemerintahan semoga prosedur ketatalaksanaan dan bentuk organisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan dari tujuan yang akan dicapai.

Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut.

Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Menurut jenisnya, daerah otonom dapat berupa otonomi teritorial, otonomi kebudayaan, dan otonomi lokal. Pengertian "otonom" secara etimologis adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri" Poerwadarminta (1999 : 542). Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (6), UU No.32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah).

Pengertian operasional Menurut R.S Stainton sebagai mana di kutip oleh Sumayang (2003 : 17) yang di maksud dengan operasional aplikasi metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah kompleks dengan mengarahkan dan mengendalikan system yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin-mesin, materi, dan uang dalam industri. Bisnis, Pemerintahan, serta pertahanan. Pendekatan yang terbaik adalah

mengembangkan suatu model ilmiah dari sistem berikut, pengukuran yang menyeluruh mengenai faktor-faktor seperti kesempatan dan resiko yang di gunakan untuk meramal atau membandingkan hasil keputusan-keputusan strategis atau pengendalian-pengendalian yang bersifat alternatif.

Fungsi pemerintahan menurut Hanif (2011 : 103) baik pusat, daerah, ataupun desa yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pemberian pelayanan tersebut bermaksud untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat disini maksudnya yaitu sejumlah penduduk atau masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah/desa yang mempunyai pikiran, perasaan, serta kepentingan yang sama dalam keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka ketahui.

Pelayanan menurut Mahsyar (2016 : 155) yaitu sebagai suatu ujung tombak dari usaha pemuasan pelanggan serta sudah menjadi keharusan yang wajib dimaksimalkan baik oleh individu maupun organisasi, sebab bentuk dari pelayanan yang diberikan terlihat kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Davey (1998 : 21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Menurut Parsons dalam buku karya Anwas (2013 : 49) pemberdayaan adalah orang memperoleh keterampilan, pengetahuan serta kekuasaan yang cukup berpengaruh pada kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan mempunyai makna dorongan dan motivasi, bimbingan maupun pendamping terhadap meningkatkan bakat individu atau masyarakat sehingga dapat hidup mandiri. Dengan demikian pemberdayaan merupakan suatu proses

meningkatkan bakat ataupun kemampuan seseorang agar dapat berdaya, yang dilakukan secara demokratis agar bisa membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat mandiri dan sejahtera.

Rasyidah (2017 : 46) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah aktivitas kemanusiaan. Agar menggapai keberdayaan, melalui pemberdayaan manusia yang mengutamakan tindakan sendiri dari yang ingin diberdayakan. Oleh karena itu pemberdayaan merupakan tindakan atau usaha agar terciptanya kemanusiaan didalam suatu aspek kehidupan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan. Yang dimulai pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang beralamat di Jalan tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dengan tujuan penelitian untuk melihat sejauh mana peran aparatur pemerintah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan gambaran tentang peran

aparatur pemerintah daerah dalam organisasi kepemudaan, yang terjadi secara obyektif namun jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini yaitu fenomenologi yang dijelaskan secara deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas tentang masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu : teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sedangkan teknik pengabsahan data terdiri dari : triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data sebagai berikut : 1) Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, lebih focus pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. 2) Penyajian data Dalam penelitian kualitatif , penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 3) Penarikan kesimpulan menarik hal- hal pokok atau penting yang menjadi hasil dari penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa

sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biring Bulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,50% mempunyai kemiringan tanah di atas 40°, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Je'neberang yaitu seluas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang 90 km.

Secara administrasi, Kabupaten Gowa terdiri atas 18 Kecamatan yaitu, Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Bungaya, Parigi, Tombolopao, Somba Opu, Pallangga, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Tompobulu, Barombong, Biringbulu, Tinggimoncong, dan Bontolempangan. Dengan jumlah keseluruhan 157 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai peran aparatur pemerintah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam hal ini dapat dikaitkan dengan teori Zubaedi dimana terdapat 3 indikator yaitu: Motivator, Komunikator dan Fasilitator. Dalam hal ini aparatur pemerintah kelurahan Mangalli kecamatan Pallangga kabupaten Gowa adalah stakeholder utama dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan.

#### **Motivator**

Motivator untuk organisasi kepemudaan di Kelurahan Mangalli, kepala kelurahan tersebut kurang menjalankan perannya kepada organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di kelurahan Mangalli. Karena pemerintah setempat selalu memberikan dukungan secara lisan saja tanpa adanya tindakan atau contoh sebagai panutan yang dapat menjadi motivasi bagi organisasi sangat berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Zubaedi dan tidak mengikutsertakan dirinya dalam pelaksanaan kegiatan serta pertemuan langsung dengan para anggota organisasi maka motivasi untuk lebih bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan organisasi menjadi kurang. Seorang aparatur pemerintah di

kelurahan tersebut seharusnya dapat menjadi motivator kepada semua organisasi agar hubungan antara pemerintah dan organisasi kepemudaan berjalan dengan harmonis dan dapat bekerja sama dalam berbagai hal, dengan demikian organisasi dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zubaedi (2013) bahwa pada peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam serta sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat mengenai hambatan permasalahan yang dihadapi. Jika dikaitkan dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang dikemukakan oleh 1) Torang (2015) tentang organisasi sebagai sistem peran 2) Syaiful (2016) tentang organisasi sebagai sebuah sistem organik yang dinamis, sangat jauh dari apa yang diharapkan melihat kondisi di lapangan tidak sesuai dengan pendapat para ahli sehingga penulis menyimpulkan bahwa pada konteks ini pemerintah setempat harusnya lebih memperhatikan perannya terhadap organisasi kepemudaan yang ada di kelurahan Mangalli karena dengan kurangnya peran menjadi motivator, maka dapat menyebabkan organisasi tersebut mengalami penurunan semangat

sehingga menimbulkan berbagai problem internal maupun eksternal yang merugikan kedua belah pihak, contohnya tidak berjalannya program kerja di organisasi, dan kurangnya kesadaran anggota organisasi kepemudaan untuk lebih berpartisipasi dalam memajukan lembaganya yang nantinya mengurangi kualitas kerjasama antara pemuda dan pemerintah setempat sehingga tidak di munafikkan akan menimbulkan konflik antara pemuda dan pemerintah yang tentu saja merugikan ke dua belah pihak.

Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut, dapat dikatakan bahwa aparat pemerintah setempat kurang menjalankan perannya dikarenakan hanya memberikan dukungan secara lisan saja tanpa adanya tindakan yang dapat menjadi contoh dan tidak mengikutsertakan dirinya pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut serta pendekatan atau pertemuan langsung antara lembaga dan pemerintah setempat sehingga motivasi yang diberikan kurang. Serta adanya sikap tidak menyamaratakan semua organisasi kepemudaan di kelurahan tersebut.

### **Komunikator**

Sebagai komunikator untuk organisasi kepemudaan di Kelurahan Mangalli, kepala kelurahan

menjalankan perannya dengan cukup baik. Karena selalu menjaga dan memberikan informasi terkait agenda atau kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun melalui via telfon atau pesan singkat. Dengan adanya komunikasi yang baik maka anggota organisasi merasa ada yang memperhatikan serta mepedulikan semua aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena tanpa dukungan seorang aparat pemerintah setempat maka organisasi tersebut akan redup dan tidak memaksimalkan kegiatannya. Peran pemerintah setempat sangat dibutuhkan dalam menjaga komunikasi dengan semua organisasi kepemudaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zubaedi (2013) pada peran ini, pendamping harus bisa menerima serta memberi informasi dari berbagai sumber pada masyarakat, agar dapat dijadikan rumusan dalam pengurusan dan pelaksanaan berbagai program dan opsi pemecahan masalahnya, dengan ini pemerintah setempat diharapkan dapat menjalankan perannya lebih baik lagi, agar dapat menyempatkan waktunya untuk berkomunikasi langsung dalam memberikan semangat dan dukungan untuk pemuda-pemudi di kelurahan Mangalli. Jika pada indikator ini di kaitkan dengan apa yang terjadi di lapangan serta fungsi pemerintah

menurut Hanif (2011) yakni memberikan pelayanan terhadap masyarakat, namun kita dapat melihat berdasarkan hasil penelitian bahwa fungsi pemerintah di wilayah yang menjadi objek peneliti dalam menuangkan karya tulis ilmiah ini itu sangat jauh dari ekspektasi dan tentunya fungsi pemerintah tidak berjalan dengan baik sebagai pelaksana pelayanan bagi masyarakat termasuk dalam hubungannya dengan organisasi kepemudaan di wilayah ini karena cenderung melakukan komunikasi yang tentunya secara tidak langsung yang mampu mempengaruhi hubungan organisasi pemuda dengan pemerintah setempat, jika dalam berkomunikasi saja itu tidak mampu di maksimalkan bagai mana mungkin perannya sebagai pemerintah itu berjalan, pada dasarnya konteks komunikasi dalam hal ini menjadi point sangat penting karena menjadi indikator untuk mengukur sebuah kinerja pemerintah. Penulis dalam hal ini dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta serta membandingkan dengan teori bahwasanya pemerintah setempat belum menjalankan tugasnya sebagai komunikator yang baik dalam melayani masyarakat khususnya organisasi pemuda karena beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan

penulis yakni dari hal yang di temukan di lapangan hingga penyesuaian dengan pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengetahui bahwa pemerintah setempat sebagai komunikator lumayan baik karena dapat mengusulkan program kerja yang dapat membantu masyarakat.

Dari hasil wawancara tersebut dengan beberapa informan yang ada dapat diketahui bahwa peran aparatur pemerintah setempat sebagai komunikator menjalankan perannya dengan cukup baik. Karena selalu menjaga dan memberikan informasi terkait agenda atau kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun melalui via telepon atau pesan singkat.

### **Fasilitator**

Sebagai fasilitator untuk organisasi kepemudaan di Kelurahan Mangalli, pemerintah setempat sangat kurang menjalankan perannya dengan baik. Dikarenakan tidak adanya fasilitas yang diberikan, strategi serta pendekatan pelaksanaan program kerja, dana yang tidak memadai dan adanya pilih kasih antara organisasi kepemudaan. Dengan kurangnya peran pemerintah tersebut maka dapat

mengakibatkan kendala pelaksanaan kegiatan suatu organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kualitas pemuda dalam bermasyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangatlah dibutuhkan bagi organisasi-organisasi tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Zubaedi (2013) pada peran ini pendamping berusaha memberikan arahan mengenai penggunaan beraneka teknik, strategi, serta pendekatan pada pelaksanaan program. Dengan ini pemerintah diharapkan dapat lebih berpartisipasi terhadap organisasi kepemudaan di kelurahan tersebut, agar organisasi yang telah dibangun tidak vacuum dan tetap aktif. Karena tanpa adanya dukungan secara moril dan materi maka sebuah organisasi akan sangat kesulitan untuk berkembang, serta perlakuan adil juga sangat diharapkan agar tidak menimbulkan kecemburuan antara sesama organisasi yang ada di wilayah ini. Pada konteks ini dapat dilihat dari pandangan teori yang dikemukakan oleh Rasyid (2010) terkait fungsi pemerintah yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu Fungsi pelayanan (*public service*), Fungsi pembangunan (*development*), Fungsi pemberdayaan (*empowering*), Fungsi pengaturan (*regulation*) bahwa apa yang menjadi hasil penelitian penulis itu bertolak belakang sebagai mana fungsi

pemerintah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasyid (2010). Dapat kita lihat dari berbagai unsur seperti kurangnya dukungan langsung kepada organisasi pemuda seperti dukungan dalam bentuk materi ataupun arahan yang tentu saja sangat dibutuhkan organisasi kepemudaan untuk menjalankan roda organisasi demi terpenuhinya tujuan yang tentu saja menguntungkan semua pihak baik bagi organisasi kepemudaan, pemerintah setempat maupun masyarakat. Inilah yang menjadi polemik di organisasi pemuda yang ada di kelurahan Mangalli di mana pemerintah sebagai fasilitator yang harusnya menjadi pendamping tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga banyak bermunculan problem yang mengurangi kinerja organisasi pemuda tentu saja sangat mempengaruhi hubungan antara organisasi pemuda dengan pemerintah. Pada dasarnya pemerintah harus mendukung dalam berbagai hal yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan yang ada di wilayah ini sehingga terjalin kerja sama yang baik demi meningkatkan fungsi pemerintah seperti yang dikemukakan oleh berbagai pendapat para ahli. Pada point ini penulis memberikan pendapatnya agar menjadi kritikan yang membangun sehingga pemerintah dan

organisasi pemuda berafiliasi dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya sehingga semua pihak saling diuntungkan.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat mengetahui bahwa pemerintah setempat tidak menjalankan perannya dengan baik sebagai fasilitator karena tidak memfasilitasi kegiatan yang akan dilakukan walaupun seperti sarana dan prasarana.

Dari hasil wawancara tersebut dengan beberapa informan yang ada dapat diketahui bahwa peran pemerintah setempat sebagai fasilitator sangat kurang karena tidak adanya fasilitas yang diberikan kepada organisasi kepemudaan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian pada Bab IV maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Peran Aparatur Pemerintah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa belum maksimal. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut: (1) Motivator. Pemerintah setempat tersebut kurang menjalankan perannya kepada organisasi-organisasi

kepemudaan yang ada di kelurahan Mangalli. Dikarenakan pemerintah setempat selalu memberikan dukungan dalam artian hanya di lisan saja dan tanpa mengikutsertakan dirinya atau pertemuan langsung dengan para anggota organisasi maka motivasi untuk lebih bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan organisasi menjadi kurang. Serta pemerintah setempat juga lebih memihak di satu organisasi saja, (2) komunikator pemerintah setempat menjalankan perannya dengan cukup baik. Karena selalu menjaga dan memberikan informasi terkait agenda atau kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun melalui via telfon atau pesan singkat, (3) fasilitator pemerintah setempat sangat kurang menjalankan perannya dengan baik. Dikarenakan tidak adanya fasilitas yang diberikan, strategi serta pendekatan pelaksanaan program kerja, dana yang tidak memadai dan adanya pilih kasih antara organisasi kepemudaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lalu Sumayang, (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Salemba: Jakarta
- Poerwadarminta, (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Balai Pustaka: Jakarta.
- Mahsyar, A. (2016). *Model Partnership Governance Dalam Penerapan*

- Community Development. Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Indonesia Menuju SDGs, 250.
- Sofiyah, D.(2018). *Peran karang taruna dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kampung domba: studi di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).
- Muchtar, Radinal. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universtias Hasanuddin. Makassar. Diakses 16 Januari 2020.
- Mustakim. (2019). *Peran Pemerintah Terhadap Perkembangan Organisasi Kepemudaan Di Desa Belabori*. Fakultas Ushuluddin *Filsafat Dan Politik*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses 16 Januari 2020.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sulaksono, T. P., Holilulloh, H., & Nurmalisa, Y. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Pemuda dalam Berorganisasi*.
- Zahra, Eviza.(2017). *Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan remaja islam masjid Al-Muttaqin di Desa Sekipi Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara*. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Diakses 15 Januari 2020.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.